

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- B. Haryono. *Filsafat Etika*. Jakarta: Prenadamedia.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Gustav Radbruch. 2011. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- _____. 1946. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Süddeutsche Juristen-Zeitung.
- Harun M. Husen. 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba. (ed.). 2016. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer.
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet-IV.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sri Soedewi Masjoehean Sofyan. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Yogyakarta: Liberti.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Zainal Asikin. 2014. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

JURNAL

- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia. 2021. *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*. *Progressive Law Review*. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- James R. Maxeiner. 2008. *Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law*. *Houston Journal of International Law*. Volume 31 Nomor 1. University of Houston Law Center. Texas.
- Opniel Harsana BP. 2016. *Penghapusan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tjarda van der Vijver. 2011. *Protection of Good Faith Purchasers in Civil Law Systems*. *Netherlands International Law Review*. Volume 58 Nomor 3. T.M.C. Asser Press. Dutch.

INTERNET

- Leo, 2021, *Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 November 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.